

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai dilihat dari rasio derajat desentralisasi keuangan pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 dan 2012 hasil analisis rasio desentralisasi keuangan daerah sebesar 0,310%, dan 0,001% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekali. Hal ini kemungkinan karena minimnya realisasi atas pos pendapatan yakni pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio desentralisasi keuangan daerah sebesar 87,33%, 86,11%, dan 87,48% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sudah mampu mengoptimalkan pengelolaan kinerja pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara baik sehingga kinerja yang dilihat dari nilai kemampuan

2. keuangan pemerintah daerah memiliki katagori rasio desentralisasi keuangan yang tinggi pada interval diatas rata-rata 75%.
3. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah pada besarnya pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 dan 2012 dengan hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 99,68% dan 99,99% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dilihat dari penerimaan transfer anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada pos-pos pendapatan transfer yakni dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, dan dana transfer pemerintah provinsi. Kemudian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 12,59%, 13,88%, dan 12,38% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekali berada pada nilai interval rata-rata dibawah 25%. Artinya adanya efisiensi anggaran pada sektor pendapatan yang tinggi sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi Maluku Utara semakin rendah dengan demikian kinerja pemerintah daerah semakin baik.

4. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer pusat, transfer Provinsi Maluku Utara dan pinjaman daerah kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,311%, dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah dengan pola hubungan bersifat konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Tahun 2012 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,001%, kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekali dengan pola hubungan bersifat instruktif artinya peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Namun rendahnya nilai pada tahun 2012 ini sesungguhnya bukan karena tingkat ketergantungan yang semakin tinggi tetapi pada tahun ini ada program pelaksana sail morotai sehingga bantuan dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat dan/atau provinsi yang tinggi menyebabkan tampak adanya tingkat ketergantungan yang semakin tinggi pula dibandingkan tahun sebelumnya. Serta hal lain menjelaskan pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber daya alam secara optimal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya efektif dari pemungutan pajak

daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 693,3%, 620,4% dan 706,6% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi atau berada pada interval rata-rata diatas 100%, dengan pola hubungan bersifat delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

5. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai dilihat dari rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam besarnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target penerimaan PAD kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah sebesar 108,7%, 121,2%, 637,5%, 219,7% dan 951,4% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi sangat efektif. Hal ini menjelaskan kinerja rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum menunjukkan kinerja yang baik yang ditandai dengan tingkat efektivitas keuangan daerah berada pada interval rata-rata diatas 100% artinya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai sangat baik.
6. Faktor-faktor yang menjadi hambatan keberhasilan realisasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai;

- 1) Belum tersedianya sistem informasi manajemen dengan baik atas data dasar pajak dan retribusi
- 2) Belum maksimal terkontrol penerapan sistem (*self assessment system*) dalam pemungutan retribusi, pajak, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 3) Kurangnya pengawasan dari DPRD dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait sistem yang diterapkan dalam meningkatkan PAD
- 4) Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi atas ketergantungan anggaran pendapatan transfer yang tinggi
- 5) Kurangnya pemanfaatan atau mengali sumber daya alam yang ada, potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 6) Kurangnya koordinasi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam pengelolaan anggaran transfer secara efisien dalam meningkatkan realisasikan sesuai target program pembangunan daerah.
- 7) Minimnya pengalokasi anggaran terhadap realisasi yang sesuai dengan target program anggaran transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dari pos-pos pendapatan pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan transfer dari pendapatan bagi hasil pajak serta pada pos lain-lain pendapatan yang sah.

- 8) Kurangnya sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta melakukan pengawasan bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun SKPD khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) aparat pengelola PAD terhadap sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

6.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut maka dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai disarankan hal-hal sebagai berikut:

a). Bagi Pemerintah Daerah

- 1) Menyediakan sistem informasi manajemen dengan baik serta memperbaiki manajemen pengelolaan data dasar pajak dan retribusi
- 2) Meningkatkan kontrol penerapan sistim (*self assessment system*) dalam pemungutan retribusi, pajak, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 3) Meningkatkan pengawasan dari DPRD dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait sistim yang diterapkan dalam meningkatkan PAD

- 4) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD dalam mengali dan menetapkan pencapaian target realisasi anggaran pendapatan daerah terutama pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos penerimaan pendapatan; pajak daerah dan retribusi daerah maupun pada transfer provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah, agar keseimbangan likuiditas keuangan daerah terkordinir dengan baik yang berdampak pada pelaksana program realisasi yang maksimal dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi atas ketergantungan menurun
- 5) Memaksimalkan pemanfaatan atau mengali sumber daya alam yang ada, potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 6) Tingkatkan koordinasi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam pengelolaan anggaran transfer secara efisien dalam meningkatkan realisasikan sesuai target program pembangunan daerah.
- 7) Meningkatkan pengalokasi anggaran terhadap realisasi yang sesuai dengan target program anggaran transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dari pos-pos pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan transfer dari pendapatan bagi hasil pajak serta pada pos lain-lain pendapatan yang sah, anggaran dalam

realisasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam realisasi anggaran secara efisien.

- 8) Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta melakukan pengawasan bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun SKPD khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) aparat pengelola PAD terhadap sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

b). Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kabupaten di provinsi maluku utara khususnya pada pemerintah daerah kabupaten pulau morotai. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.